

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGARUHNYA PADA BELANJA DAERAH DI INDONESIA

Nur Afni Yunita^{1*)} dan Muhammad Yusra^{2*)}

^{1,2)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

^{*)}Email: nurafni.yunita@unimal.ac.id dan myusra@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia. Sumber data pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berupa data tentang anggaran pendapatan asli daerah dan anggaran belanja daerah pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2013 s.d 2017 dengan total populasi sebanyak 170 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

1. Pendahuluan

Penerimaan daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kondisi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang semakin di tingkatkan adalah melalui penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak adalah sumber penerimaan daerah yang paling besar didalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah. Secara bertahap tingkat kemandirian sebuah daerah akan terus diupayakan semakin tinggi melalui peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh. Pendapatan tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan Belanja Daerah yang semakin besar pula.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung

penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

2. Kajian Teoritis

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abdul (2001) mendefenisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdsarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Daerah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
- hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
 - jasa giro
 - pendapatan bunga
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

b. Belanja Daerah (BD)

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja. Cheng (1999) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa tax-spend hypothesis berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Columbia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Selanjutnya Friendman (1978) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akan memperbesar defisit. Hoover dan Sheffrin (1992) dalam Abdullah dan Halim (2003) secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

Abdullah (2013) menyatakan bahwa perubahan target atas Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif agency theory, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/ atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan "adjustment" pada saat dilakukan perubahan APBD.

3. Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2013 s.d 2017 dengan masa pengamatan selama 5 tahun. Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi. Objek penelitian adalah APBD di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *times series* berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, periode waktu dari tahun 2013 s.d tahun 2017.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendaatan Asli Daerah terhadap belanja daerah pada Provinsi di Indonesia. Model regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana:

Y : Belanja Daerah

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi

e : *Standar Error*

4. Hasil dan Pembahasan

a. Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil statistik deskriptif untuk Belanja Daerah (BD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Deskriptif Statistik

Variabel	Min	Mak	Mean	Std. Deviasi
BD	77,8	51.066,00	7,2	8,4
PAD	1,3	43.901,50	3,7	6,6

Berdasarkan tabel 1 diperoleh anggaran Belanja Daerah Hasil selama 5 tahun (dari tahun 2013 s.d 2017), nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 7,2 Trilyun Rupiah, nilai minimum belanja daerah sebesar 77,8 Milyar untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum untuk Belanja Daerah sebesar 51,0 Trilyun Rupiah untuk Provinsi DKI Jakarta pada 2017. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 8,4.

Variabel selanjutnya yaitu Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai rata-rata (*mean*) selama 5 tahun sebesar 3,7 Trilyun Rupiah, dengan nilai minimumnya sebesar 1,3 Milyar Rupiah untuk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 43,9 Trilyun Rupiah diperoleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Nilai standar deviasi selama 5 tahun pengamatan sebesar 6,6.

b. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada persamaan berikut ini:

$$BD = 4,605 + 0,891 PAD$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (*a*) sebesar 4,605, artinya jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) dianggap konstan, maka Belanja Daerah mempunyai nilai sebesar 4,605.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear. Metode analisis linear sederhana menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan variabel independen dalam suatu model penelitian.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,891, artinya jika Pendapatan Asli Daerah meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 89,1%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan yang tajam.

c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa Pendapatan Asli Daerah ikut meningkatkan Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa Provinsi yang mendapatkan Pendapatan Asli

Daerah yang besar akan cenderung memiliki Belanja Daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber-sumber penerimaan, salah satunya adalah dari pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin mencerminkan sebuah daerah atau provinsi mampu mandiri untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran belanja daerah yang dianggarkan.

Di Indonesia umumnya Pendapatan Asli Daerah selain di alokasikan untuk Belanja Modal, alokasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah juga untuk belanja operasi pegawai. Hal tersebut karena belanja pegawai akan diharapkan meningkatkan kinerja aparatur daerah untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan publik, penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi di daerah sehingga sumber penting penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non-fisik (Ifrizal, 2015).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abdullah (2013) yang menyatakan bahwa perubahan atas pendapatan terutama PAD, bisa berlatarbelakang perilaku oportuniste para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di DPRD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Kusnandar & Siswantoro (2011) yang hasilnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

5. Simpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia.

b. Saran

Adapun yang menjadi saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel independen yang lain, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan variabel lain yang sesuai.

2. Bagi pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada agar Provinsi di Indonesia dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar sehingga tidak hanya mengandalkan pada dana bagi hasil, alokasi umum dan dana lain saja.

c. Keterbatasan

Terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai Belanja Daerah hanya menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah saja. Masih banyak variabel lain yang belum masuk atau kemungkinan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.
2. Periode tahun pengamatan yang dilakukan hanya lima tahun, diperlukan periode pengamatan yang lebih lama untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II*, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Cornia, Gray C, Ray D. Nelson & Andera Wilko. 2004. Fiskal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*. Vol.64, No. 2: 164 – 179.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. 2003. Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4: 484 – 497.
- Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Proseses. *Public Administration Review*. Vol. 52 No. 5: 467 – 473.
- Hariato, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007.
- Halim, Abdul . 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____,2007 . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Kusnandar dan Dodik Siwantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa lebih pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 16: 101-11.
- Marzalita. 2014. faktor-faktor yang memengaruhi perubahan anggaran belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 3 no. 3: 46-58.
- Mardiasmo ,2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____,2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Buku Satu, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarni, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatn Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*

